

## **ABSTRAK**

Yulia Dewitasari (00000016821)

### **ANALISIS YURIDIS PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

(xi + 132 halaman: 2 lampiran)

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memperbolehkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan melalui sarana telekonferensi dan menggantikan pertemuan secara fisik serta diperbolehkan ditandatangani secara elektronik. Permasalahan timbul karena UUPT tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana proses penyelenggaraan RUPS tersebut dapat berjalan serta bagaimana kewenangan Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat membuat akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi tersebut.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi tetap melalui tahap-tahap seperti penyusunan bahan, pemanggilan serta penandatanganan risalah sebagaimana RUPS pada umumnya namun wajib dilengkapi dengan perangkat komputer yang memungkinkan para peserta rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Mengenai kewenangan Notaris dalam mengikuti dan membuat Berita Acara RUPS yang diselenggarakan melalui media telekonferensi masih terdapat kekosongan hukum mengingat baik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) maupun UUPT tidak menyebutkan dengan tegas bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi. Terlebih lagi pembuatan Berita Acara RUPS melalui telekonferensi oleh Notaris berpotensi melanggar beberapa ketentuan di dalam UUJN.

Kata kunci : notaris, kewenangan, rapat umum pemegang saham, telekonferensi

Referensi : 54 (1983-2016)

## **ABSTRACT**

Yulia Dewitasari (00000016821)

### **JURIDICAL ANALYSIS OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THROUGH TELECONFERENCE AND ITS RELATION TO THE ESTABLISHMENT OF NOTARY DEEDS**

(xi + 132 pages: 2 attachments)

Article 77 Act Number 40 Year 2007 on Limited Company (UUPT) allowing General Meeting of Shareholders (GMS) to be held through teleconference as a substitute of physical meeting, also allowing the deeds to be in form of electronic signature. Problem occur as UUPT did not regulate further rule about how the GMS should be held and how public notary as the authorized maker of the notary deeds, could make the GMS official report through teleconference.

In this research, the data-collecting process was done using statute approach and conceptual approach. The result concluded that GMS implementation through teleconference undergo stages such as preparation of the meeting materials, invitation to GMS, and signing the resume how usual GMS was held, but in addition it has to be equipped with computer devices that allow the participants to see and hear each other directly also allow them to participate in the meeting. The writer found a legal vacuum on public notary authority to participate on GMS and make the GMS official report through teleconference, considering Act Number 30 Year 2004 jo Act Number 2 Year 2014 on Notary Function (UUJN) and UUPT did not clearly mention the public notary authority to make GMS official report through teleconference. Moreover, the establishment of GMS official report potentially violate some articles in UUJN.

Keywords : public notary, authority, general meeting of shareholders, teleconference.

References : 54 (1983-2016)